

RINGKASAN

Aine Yudha Prastiwi, NIM : 202102020125. Implementasi Kebijakan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Studi Kasus di Desa Tanjunggunung Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang). Pembimbing I: Dr. Imam Fachrudin, M.Si. Pembimbing II: Dr. Teguh Pramono, M.Si. Tujuan penelitian ini adalah pertama, Mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Tanjunggunung, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang. Kedua, Mendeskripsikan faktor Apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung Implementasi Kebijakan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Tanjunggunung, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Tipe penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis Lokasi penelitian ini ditetapkan di Desa Tanjunggunung, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang. Untuk menentukan informan kunci (*key informan*) digunakan teknik *purposive sampling*, sedangkan untuk menentukan banyaknya sumber data digunakan *teknik snowball sampling*. penelitian ini menggunakan teknik Wawancara, Metode Observasi, Dokumentasi untuk mendapatkan data. Untuk menganalisis data yang telah diperoleh dari lapangan digunakan model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Hubermans.

Hasil penelitian adalah Komunikasi berjalan sangat baik mengingat BPD sudah menjalankan seluruh tugas penyaluran aspirasi masyarakat, pembuatan peraturan Desa dan pengawasan Kinerja Kepala Desa. Sumber daya sangat mencukupi dalam BPD Tanjunggunung dengan 4 Sumberdaya yakni Sumebrdaya manusia dengan 9 anggota, fasilitas yang mencukupi. Wewenang dan informasi yang mencukupi untuk berjalannya tugas BPD. Disposisi atau Penyerahan kewenangan terjadi secara musyawarah dan tercatat pada dokumentasi yang jelas saat penyerahan kewenangan kepada masing-masing pengurus sesuai dengan SOP Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan insentif yang diberikan masih minim. Struktur Birokrasi seluruh bagian berjalan sesuai dengan pedoman SOP yang ada dan setiap bagian terfragmentasi dengan baik.

Faktor Penghambat Implementasi kebijakan PERMENDAGRI Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tanjunggunung adalah Keterbatasan Anggaran untuk insentif BPD. Sedangkan Faktor Pendukung Implementasi kebijakan PERMENDAGRI Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tanjunggunung adalah pertama Sinergitas antar Stakeholder dalam melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat Desa Tanjunggunung. Kedua, Kompetensi dari masing-masing anggota BPD yang sudah berpengalaman dalam membantu kinerja Pemerintah Desa Tanjunggunung sesuai koridor keinginan masyarakat Desa Tanjunggunung.

Kata Kunci : implementasi, BPD, Jombang

SUMMARY

Aine Yudha Prastiwi, NIM: 202102020125. Implementation of Minister of Home Affairs Policy Number 110 of 2016 concerning Village Consultative Bodies case study in Tanjunggunung Village, Peterongan District, Jombang Regency. Supervisor I: Dr. Imam Fachrudin, M.Sc. Supervisor II: Dr. Teguh Pramono, M.Sc. The aim of this research is first 1. To describe and analyze the implementation of Minister of Home Affairs Regulation Number 110 of 2016 concerning Village Consultative Bodies in Tanjunggunung Village, Peterongan District, Jombang Regency. Second, explain what factors hinder and support the implementation of Minister of Home Affairs Policy Number 110 of 2016 concerning Village Consultative Bodies in Tanjunggunung Village, Peterongan District, Jombang Regency.

This research uses qualitative research, which uses descriptive analysis methods. The location of this research was set in Tanjunggunung Village, Peterongan District, Jombang Regency. A purposive sampling technique was used to determine critical informants, while a snowball sampling technique was used to determine the number of data sources. This research uses interview techniques, observation methods, and documentation to obtain data. Miles and Huberman developed an interactive model to analyze the data received from the field.

The research results show that communication is going very well, considering that BPD has carried out all the tasks of channeling community aspirations, making village regulations, and monitoring the performance of the village head. Resources are sufficient in BPD Tanjunggunung, with four resources, namely human resources, nine members, adequate facilities, and enough authority and information to carry out the BPD's duties. Disposition or handover of authority occurs by deliberation. It is recorded in clear documentation when handing over authority to each administrator by the SOP of Jombang Regency Regional Regulation Number 8 of 2022 concerning the Village Consultative Body. The incentives provided are still minimal. The bureaucratic structure of all sections runs by existing SOP guidelines, and each section is fragmented.

The limited budget for BPD incentives is the Inhibiting Factor for the Implementation of PERMENDAGRI policy Number 110 of 2016 concerning the Village Consultative Body in Tanjunggunung Village. Meanwhile, the supporting factor for implementing the policy of PERMENDAGRI Number 110 of 2016 concerning the Village Consultative Body in Tanjunggunung Village is, firstly, Synergy between Stakeholders in carrying out services to the people of Tanjunggunung Village. Second, the competency of each BPD member who is experienced in assisting the performance of the Tanjunggunung Village Government according to the wishes of the Tanjunggunung Village community. Keywords: implementation, BPD, Jombang.